Badan Narkotika Nasional
Provinsi Sumatera Selatan

RENCANA PROGRAM KERJA JANGKA MENENGAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2020 - 2024

Jalan Gubernur H. A. Bastari Komp. Ogan Permata Indah (OPI) Jakabaring Palembang
Telepon/Faksimili : (0711) 5620066 – 5620077
Whatsapp : 0898 3333 022, Instagram : infobnn_prov_sumsel
Email : bnnp_sumsel@bnn.go.id, Website : sumsel.bnn.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penyusunan Rencana Program Kerja Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 ini dapat diselesaikan desesuai dengan target waktu yang ditentukan.

Penyusunan Rencana Program Kerja ini dimaksudkan sebagai implementasi Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan SAKIP di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, yang menegaskan bahwa Unit Kerja Vertikal (BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota) menyusun Rencana Program Kerja untuk masa 5 (lima) tahun dengan mengacu pada Rencana Strategis BNN dan Rencana Strategis Unit Eselon I.

Dalam Rencana Program Kerja ini disajikan target capaian kinerja dan pendanaan BNN Provinsi Sumatera Selatan beserta BNN Kabupaten/Kota di Wilayah Sumatera Selatan dalam kurun waktu 5 (tahun) yaitu periode Tahun 2020-2024. Rencana Program Kerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran obyektif dan dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan suatu kegiatan pada periode Tahun 2020-2024.

Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Rencana Program Kerja Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024. Semoga penyusunan penerbitan Rencana Program Kerja Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 ini mendapatkan ridha dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Sumatera Selatan

Djoko Prihadi, S.H.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar…….. i
Daftar Isi…….. ii
Daftar Tabel …….. iii
Daftar Gambar……... iv
Bab I Pendahuluan
A. Kondisi Umum……. 1
B. Potensi dan Permasalahan…….. 17
Bab II Kebijakan dan Strategi Operasional
A. Tujuan Organisasi……. 19
B. Arah Kebijakan dan Strategi Operasional……. 20
Bab III Rencana Kinerja dan Kebutuhan Pendanaan
A. Rencana Kinerja…… 21
B. Rencana Kebutuhan Pendanaan…… 21
Bab IV Penutup…….. 22
Lampiran 1 Matrik Rencana Kinerja…….. 23
Lampiran 2 Matrik Rencana Kebutuhan Pendanaan……..... 25
Lampiran 3 Matrik Output dan Rencana Komponen/Sub Komponen…….. 27

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kewilayahan Provinsi Sumatera Selatan…….. 3

Tabel 1.2 Sarana Pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020…….. 5

Tabel 1.3 Fasilitas Kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020…….. 6

Tabel 1.4 Sarana Klinik BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota…… 7

Tabel 1.5 Jumlah Pegawai berdasarkan Status Keegawaian di Wilayah BNN Provinsi Sumatera Selatan per Juli Tahun 2021…….. 8

Tabel 1.6 Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin di Wilayah BNN Provinsi Sumatera Selatan per Juli Tahun 2021……. 9

Tabel 1.7 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan Kepangkatan di BNN Provinsi Sumatera Selatan per Juli Tahun 2021…….. 10

Tabel 1.8 Data Kasus Tindak Pidana Narkotika Tahun 2017-2020…….. 11

Tabel 1.9 Data Penyalahguna Narkoba yang Lapor Diri (Voluntary) dan mendapat layanan rehabilitasi Periode Tahun 2016-2020……. 11

Tabel 2.0 Data Penghuni Lapas Kasus Penyalahgunaan Narkoba…….. 14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia…… 2
Gambar 2 Perbatasan Wilayah Provinsi Sumatera Selatan…….. 4
Gambar 3 Bangunan Kantor BNN Provinsi Sumatera Selatan…….. 7

BAB I
PENDAHULUAN

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi Daerah, lintas Satuan Kerja Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana jangka menengah sebagaimana dimaksud merupakan penjabaran secara strategik terhadap visi-misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan strategi, serta program prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan selama periode tahun 2020-2024.

Rencana Program Kerja yang selanjutnya disingkat dengan RENPROJA adalah dokumen Perencanaan Satuan Kerja Satker Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Rencana Program Kerja BNN Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 sebagai sebuah Rencana Strategis Satuan Kerja Satker disusun sesuai dengan tugas dan fungsi BNN Provinsi Sumatera Selatan serta berpedoman pada Rencana Strategis BNN RI serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023.

Proses penyusunan Rencana Program Kerja BNN Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 didasarkan pada kebutuhan dan penjaringan aspirasi yang melibatkan pegawai di lingkungan BNN Provinsi Sumatera Selatan. Dokumen Renproja ini dihasilkan melalui suatu proses yang yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan Tahun 2024 dengan cara yang sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Penyusunan Renproja ini dilakukan berdasarkan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan di Tahun 2021 sebagai data dasar (*baseline data*).

A. KONDISI UMUM

Gambaran kondisi umum, potensi, dan permasalahan pembangunan P4GN dipaparkan berdasarkan dari hasil pencapaian program periode sebelumnya, kondisi lingkungan strategis, dan perkembangan baru lainnya. Potensi dan permasalahan pembangunan P4GN akan menjadi input dalam menentukan arah kebijakan dan strategi BNN Provinsi Sumatera Selatan pada periode 2020-2024. Pada perkembanganya, kejahatan narkoba yang bermutasi dengan kejahatan lainnya menyebabkan kerugian sosial ekonomi secara material diperkirakan mencapai sebesar 84,6 Triliun Rupiah per tahunnya.

Kinerja pencegahan dan pemberantasan terhadap kejahatan dan pelanggaran hukum baik berupa kejahatan penyalahgunaan maupun kejahatan peredaran gelap narkoba, sebagaimana menjadi mandat konstitusional keberadaan BNN, merupakan perwujudan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan terhadap warga negaranya untuk tidak menjadi korban dan pelaku kejahatan narkoba. Dalam kaitan tersebut, kinerja BNN akan selalu dihubungkan dengan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba yang menunjukkan atau menggambarkan situasi penyalahgunaan narkoba yang sedang terjadi saat ini. Berdasarkan survei prevalensi yang telah dilakukan, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa prevalensi cenderung fluktuatif dan khusus laju angka prevalensi 1 (satu) tahun terakhir mengalami peningkatan, sebagaimana disajikan dalam gambar berikut :

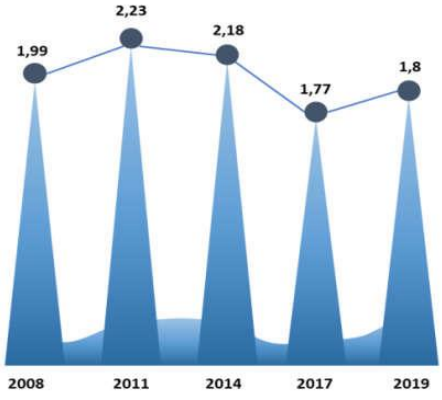

Gambar 1 Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia

Sumber : Hasil Survey BNN RI (Renstra BNN RI)

Dari data tersebut, angka prevalensi dalam bingkai periode pembangunan lima (5) tahunan mengalami kecenderungan menurun, namun pada tahun 2019

mengalami peningkatan 0,03%. Kondisi tersebut menjadi basis tuntutan untuk terus memperbaiki capaian kinerja BNN secara institusional sekaligus keluar dari kondisi dan status yang dilabeli sebagai situasi "darurat narkoba".

Secara obyektif, Indonesia melalui berbagai institusi dengan BNN sebagai *Leading Sector* masih harus bekerja keras untuk benar-benar keluar dari kondisi darurat tersebut. Penanganan tersebut harus benar-benar tepat agar konfigurasi penyalahgunaan narkoba kalangan coba pakai tidak terus membesar pada satu sisi dan pada sisi yang lain juga tidak berkembang menjadi pecandu. Dalam hal ini, penyalah guna narkoba coba pakai harus secara tepat mendapat penanganan untuk menekan perkembangannya.

A.1 Kondisi Provinsi

Sumatera Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di bagian selatan Pulau Sumatera.Provinsi ini beribukota di Palembang.Secara geografis provinsi Sumatera Selatan berbatasan dengan provinsi Jambi di utara, provinsi Kep.Bangka-Belitung di timur, provinsi Lampung di selatan dan Provinsi Bengkulu di barat.Secara administratif Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 13 (tiga belas) Pemerintah Kabupaten dan 4 (empat) Pemerintah Kota, beserta perangkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.Pemerintah Kabupaten dan Kota membawahi Pemerintah Kecamatan dan Desa / Kelurahan. Pemerintahan Kabupaten / Kota tersebut sebagai berikut :

Tabel 1.1 Data Kewilayahan Provinsi Sumatera Selatan

No	Kabupaten/Kota	Ibukota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km^2)
1	Ogan Komering Ulu	Baturaja	367,603	4,797.06
2	Ogan Komering Ilir	Kayu Agung	769,348	18,359.04
3	Muara Enim	Muara Enim	612,900	7,383.90
4	Lahat	Lahat	430,071	5,311.74
5	Musi Rawas	Muara Beliti	395,570	6,350.10
6	Musi Banyuasin	Sekayu	622,206	14,266.26
7	Banyuasin	Pangkalan Balai	836,914	11,832.99
8	Ogan Komering Ulu Selatan	Muara Dua	408,981	5,493.94
9	Ogan Komering Ulu Timur	Martapura	649,853	3,370.00

10	Ogan Ilir	Indralaya	416,549	2,666.09
11	Empat Lawang	Tebing Tinggi	333,622	2,256.44
12	Penukal Abab Lematan Ilir	Talang Ubi	194,900	1,840.00
13	Musi Rawas Utara	Rupit	188,861	6,008.55
14	Palembang	Palembang	1,668,848	369.22
15	Prabumulih	Prabumulih	193,196	251.94
16	Pagar Alam	Pagar Alam	143,844	633.66
17	Lubuk Linggau	Lubuk Linggau	234,166	401.50
Sumatera Selatan			**8,467,432**	**91,592.43**

Sumber Data : BPS Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020

Untuk perbatasan Wilayah Sumatera Selatan, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2 Perbatasan Wilayah Provinsi Sumatera Selatan

Pada tahun 2020 jumlah penduduk Sumatera Selatan sudah mencapai 8.467.000 jiwa, yang menempatkan Sumatera Selatan sebagai provinsi ke-9 terbesar penduduknya di Indonesia, BPS. Secara absolut jumlah penduduk Sumatera Selatan terus bertambah dari tahun ke tahun. Tercatat pada tahun 1971 jumlah penduduk sebesar 2,931 juta jiwa, meningkat menjadi 3,975 juta iwa pada tahun 980, 5,493 juta jiwa pada tahun 1990, 6,273 juta jiwa pada tahun 2000 serta 8,467 juta jiwa pada tahun 2020.

Sumatera Selatan yang secara geografis terletak strategis dapat dijadikan tempat transit dan pintu masuk perdagangan sehingga menjadi salah satu

peluang berbagai komponen masyarakat untuk dapat melaksanakan berbagai kegiatan, termasuk peredaran gelap Narkoba. Hal inilah yang menjadi alasan utama terkait sangat rawannya peredaran gelap narkoba di Provinsi Sumatera Selatan. Ancaman masuknya peredaran Narkotika di Provinsi Sumatera Selatan melalui jalur laut antara lain melalui Pelabuhan Tanjung Api-Api. Sedangkan masuknya Narkotika melalui jalur udara antara lain melalui Bandar Udara Sultan Mahmud Badarudin II dan Bandar Udara Silampari.

Sarana pendidikan yang ada di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 1.2 Sarana Pendidikan diProvinsi Sumatera Selatan Tahun 2020

No.	Kabupaten/Kota	SD Sederajat	SMP Sederajat	SMA Sederajat	Perguruan Tinggi
1	Ogan Komering Ulu	228	81	50	5
2	Ogan Komering Ilir	531	206	104	5
3	Muara Enim	427	141	75	6
4	Lahat	319	90	58	2
5	Musi Rawas	335	99	48	-
6	Musi Banyuasin	505	194	100	5
7	Banyuasin	563	193	114	-
8	OKU Selatan	295	90	46	2
9	OKU Timur	494	153	109	9
10	Ogan Ilir	282	121	70	3
11	Empat Lawang	192	41	22	-
12	Penukal Abab Lematang Ilir	134	57	40	1
13	Musi Rawas Utara	143	52	23	1
14	Palembang	476	244	216	72
15	Prabumulih	104	29	29	6
16	Pagar Alam	97	29	20	8
17	Lubuk Linggau	114	43	43	9
TOTAL		**5239**	**1863**	**1167**	**134**

Sumber Data : BPS Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020

Fasilitas Kesehatan Masyarakat di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2019 antara lain:

Tabel 1.3 Fasilitas Kesehatan di Provinsi Sumatera SelatanTahun 2018/2019

No.	Kabupaten/ Kota	RS Umum	RS Khusus	RS Ibu & Anak	Puskesmas	Klinik/ Balai Kesehatan	Posyandu	Polindes
1	Ogan Komering Ulu	4	-	-	18	17	165	172
2	Ogan Komering Ilir	3	-	-	32	20	722	292
3	Muara Enim	5	-	-	22	20	221	257
4	Lahat	2	-	-	33	13	351	199
5	Musi Rawas	2	-	-	19	12	177	203
6	Musi Banyuasin	3	-	-	28	9	350	276
7	Banyuasin	4	-	-	33	29	539	305
8	OKU Selatan	1	-	-	19	5	321	222
9	OKU Timur	4	-	-	22	18	399	291
10	Ogan Ilir	3	-	-	25	9	296	217
11	Empat Lawang	2	-	-	10	2	114	115
12	Penukal Abab Lematang Ilir	1	-	-	7	3	121	75
13	Musi Rawas Utara	1	-	-	8	4	111	46
14	Palembang	23	4	9	41	90	622	-
15	Prabumulih	4	-	-	9	18	96	40
16	Pagar Alam	1	-	-	7	14	127	58
17	Lubuk Linggau	3	-	2	10	12	97	48
TOTAL		**66**	**4**	**13**	**343**	**295**	**4829**	**2816**

Sumber Data : BPS Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018/2019

A.1. Kondisi BNN Provinsi Sumatera Selatan

BNN Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan perpanjangan dari BNN RI, wilayah kerjanya mencakup wilayah hukum dan wilyah geografis Provinsi Sumatera Selatan.BNN Provinsi Sumatera Selatan resmi menjadi Lembaga Negara yang Vertikal sejak Tahun 2011 yang berlokasi di Jl. Gubernur H.A Bastari Komp.OPI Jakabaring Palembang. Gedung kantor dibangun di atas

tanah yang merupakan aset hibah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan sudah ditempati sejak Tahun 2012.

Gambar 3 Bangunan Kantor BNN Provinsi Sumatera Selatan

Untuk BNN Kabupaten/Kota di Wilayah BNN Provinsi Sumatera Selatan yang sudah memiliki Gedung Sendiri ada 5 (lima) yaitu BNN Provinsi Sumatera Selatan, BNN Kota Pagaralam, BNN Kota Lubuk Linggau, BNN Kabupaten Empat Lawang dan BNN Kabupaten Musi Rawas. Gedung kantor dengan status Pinjam Pakai ada di 3 (tiga) BNN Kabupaten/Kota yaitu BNN Kabupaten Muara Enim, BNN Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan BNN Kabupaten OKU Timur. Sedangkan BNN Kabupaten Prabumulih dan BNN Kabupaten Ogan Ilir status Gedung kantor yaitu Sewa.

Sarana layanan Klinik Pratama yang ada di BNN Provinsi Sumatera Selatan dan BNN Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.4 Sarana Klinik BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota

No	Nama Klinik BNNP/Kab/Kota	Masa Berlaku Ijin	Status
1.	Klinik Pratama BNNP Sumsel	16 November 2025	IPWL
2.	Klinik Pratama Saling Keruani Sangi	19 Januari 2026	IPWL

	Kerawati BNNK Empat Lawang		
3.	Klinik Pratama Mandiri BNNK Ogan Komering Ilir	06 Juni 2022	Non IPWL
4.	Klinik Pratama Ika Mandiri BNNK Muara Enim	18 Desember 2022	IPWL
5.	Klinik Pratama Pradana Medika BNNK Ogan Ilir	07 Desember 2021	IPWL
6.	Klinik Pratama BNN Kabupaten OKU Timur	25 Februari 2025	IPWL
7.	Klinik Pratama Sebiduk Semare BNNK Lubuk Linggau	02 Juni 2025	Non IPWL
8.	Klinik Pratama “Abdi Karya” BNN Kota Pagar Alam	22 Juni 2025	Non IPWL
9.	Klinik Pratama Sehat Berkarya BNNK Musi Rawas	31 Desember 2021	Non IPWL
10.	Klinik Pratama Praja Nugraha BNNK Prabumulih	22 Juni 2022	Non IPWL

Sumber Data : BNN Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021

Selain gedung kantor dan sarana klinik, BNN Provinsi Sumatera Selatan memiliki inventaris berupa senjata api, dimana ada yang disimpan di BNN Provinsi Sumatera Selatan dan didistribusikan ke masing-masing BNN Kabupaten/Kota. Rincian inventaris senjata api yang dimiliki sebagai berikut:

a. Senjata Api Laras Pendek (CZ 07 Kadet) : 29 buah
b. Senjata Api Laras Panjang (Shotgun 12 GA) : 11 buah
c. Senjata Api Laras Panjang (Scorpion EVO 3 S1) : 12 buah

Pegawai di Wilayah BNN Provinsi Sumatera Selatan dan jajaran per Juli 2021 berjumlah 184 (seratus delapan puluh empat) orang. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian dapat dilihat pada tabeli berikut:

Tabel 1.5 Jumlah pegawai berdasarkan Status Kepegawaian di Wilayah BNN Provinsi Sumatera Selatan per Juli Tahun 2021

No	Satker	Status Kepegawaian			Jumlah
		PNS Organik	PNS DPK	POLRI	
1	BNNP Sumatera Selatan	49	0	12	61
2	BNNK Empat Lawang	6	0	1	7
3	BNNK Pagaralam	10	0	0	10

4	BNNK Lubuk Linggau	13	0	3	16
5	BNNK Prabumulih	19	1	2	22
6	BNNK Muara Enim	8	1	3	12
7	BNNK Musi Rawas	16	0	0	16
8	BNNK Ogan Ilir	18	0	1	19
9	BNNK Ogan Komering Ilir	11	0	1	12
10	BNNK OKU Timur	8	0	1	9
JUMLAH		**158**	**2**	**24**	**184**

Sumber Data : BNN Provinsi Sumatera Selatan per Juli 2021

Dari data di atas, pegawai di Wilayah BNN Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Status Kepegawaian, terbanyak adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 160 orang atau sebesar 86,96%, 2 (dua) orang diantaranya masih berstatus PNS Dipekerjakan yang saat ini masih dalam proses alih status menjadi PNS Organik. Sisanya yaitu pegawai POLRI yang Dipekerjakan sebanyak 24 orang atau sebanyak 13,04%.

Jumlah pegawai di Wilayah BNN Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.6 Jumlah pegawai berdasarkan Jenis kelamin di Wilayah BNN Provinsi Sumatera Selatan per Juli Tahun 2021

No	Satker	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	BNNP Sumatera Selatan	29	32	61
2	BNNK Empat Lawang	3	4	7
3	BNNK Pagaralam	4	6	10
4	BNNK Lubuk Linggau	9	7	16
5	BNNK Prabumulih	13	9	22
6	BNNK Muara Enim	7	5	12
7	BNNK Musi Rawas	9	7	16
8	BNNK Ogan Ilir	9	10	19
9	BNNK Ogan Komering Ilir	7	5	12
10	BNNK OKU Timur	7	2	9
JUMLAH		**88**	**87**	**184**

Sumber Data : BNN Provinsi Sumatera Selatan per Juli 2021

Jumlah pegawai di Wilayah BNN Provinsi Sumatera Selatan tidak jauh berbeda antara Laki-laki dan Perempuan, terbanyak pegawai Laki-laki yaitu sebesar 52,72% (97orang) dan Perempuan sebanyak 87 orang yaitu 47,28%.

Berdasarkan Golongan Kepegawaian (PNS dan POLRI), jumlah pegawai di Wilayah BNN Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.7 Jumlah pegawai berdasarkan Golongan Kepangkatan di Lingkungan BNN Provinsi Sumatera Selatan per Juli Tahun 2021

No	Satker	Golongan Kepangkatan			Jumlah
		II	III	IV	
1	BNNP Sumatera Selatan	13	42	6	61
2	BNNK Empat Lawang	3	3	1	7
3	BNNK Pagaralam	3	5	2	10
4	BNNK Lubuk Linggau	5	10	1	16
5	BNNK Prabumulih	4	16	2	22
6	BNNK Muara Enim	5	6	1	12
7	BNNK Musi Rawas	1	14	1	16
8	BNNK Ogan Ilir	4	13	2	19
9	BNNK Ogan Komering Ilir	3	8	1	12
10	BNNK OKU Timur	1	7	1	9
JUMLAH		**42**	**124**	**18**	**184**

Sumber Data : BNN Provinsi Sumatera Selatan per Juli 2021

Pegawai di Wilayah BNN Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan golongan kepangkatan terbanyak adalah golongan III sebanyak 124 orang atau sebesar 67,39%, kemudian golongan II sebesar 22,83% (42 orang), dan golongan IV yang hanya 9,78% atau 18 orang.

A.2. Kondisi Umum *Supply Side*

Pemberantasan peredaran gelap narkoba bertujuan memutus rantai ketersediaan narkoba ilegal dalam rangka menekan laju pertumbuhan angka prevalensi. Ekspektasi masyarakat terhadap kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatandalam aspek pemberantasan ini cukup besar. Hal tersebut tampak pada tingginya animo masyarakat dalam liputan pemberitaan media massa nasional setiap kali terjadi pengungkapan kasus narkoba. Jumlah

Tindak Pidana (JTP) Narkotika di Sumatera Selatan bersifat fluktuatif setiap tahunnya.Sindikat kejahatan narkoba masih terus berkembang serta belum menunjukan adanya penurunan kejahatan narkoba secara signifikan.

Berikut potret kasus tindak pidana narkoba di Sumatera Selatan periode Tahun 2017-2020:

Tabel 1.8 Data Kasus Tindak Pidana Narkotika Tahun 2017-2020

	2017		2018		2019		2020	
	JTP	TSK	JTP	TSK	JTP	TSK	JTP	TSK
Polda SumSel	1759	2410	1911	2474	1599	2071	1851	2372
BNNP dan jajaran	60	89	71	102	40	55	33	44

Sumber: Polda Sumsel dan BNN Provinsi Sumatera Selatan

A.3. Kondisi Umum *Demand Side*

Berdasarkan data dari Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan, penyalah guna narkoba yang lapor diri (voluntary) dapat dikatakan telah mendapatkan layanan rehabilitasi. Adapun data tersebut sebagai berikut:

Tabel 1.9 Data Penyalahguna Narkoba yang Lapor Diri (Voluntary) dan mendapat layanan rehabilitasi Periode Tahun 2016-2020

Satuan Kerja	2016	2017	2018	2019	2020
BNN Provinsi Sumatera Selatan	506	482	475	444	403
BNN Kota Prabumulih	175	95	110	87	68
BNN Kota Pagar Alam	58	40	27	55	83
BNN Kota Lubuk Linggau	178	108	75	75	67
BNN Kab. Empat Lawang	39	45	16	51	25
BNN Kab. Ogan Komering Ilir	0	7	25	34	41
BNN Kab. Ogan Ilir	0	57	42	70	60
BNN Kab. Muara Enim	4	57	44	104	155
BNN Kab. Musi Rawas	6	31	23	41	30
BNN Kab. Ogan Komering Ulu	0	0	1	4	44
Total	**966**	**922**	**838**	**965**	**976**

Sumber Data :Bidang Rehabilitasi BNN Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2020

Fasilitas Layanan Rehabilitasi di BNN Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 2 (dua) yaitu Layanan Rehabilitasi Instansi Pemerintah dan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat.Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah ada 23 (dua puluh tiga) unit antara lain:

1. Klinik Pratama BNNP Sumatera Selatan
2. Klinik Pratama Praja Nugraha BNNK Prabumulih
3. Klinik Pratama Abdi Karya BNNK Pagar Alam
4. Klinik Pratama Sebiduk Semare BNNK Lubuk Linggau
5. Klinik Pratama Sehat Berkarya BNNK Musi Rawas
6. Klinik Pratama Mandiri BNNK Ogan Komering Ilir
7. Klinik Pratama Pradana Medika BNNK Ogan Ilir
8. Klinik Pratama Ika Mandiri BNNK Muara Enim
9. Klinik Pratama Saling Keruani Sangi Kerawati BNNK Empat Lawang
10. Klinik Pratama BNN Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
11. Rumah Sakit Ernaldi Bahar
12. IPWL Sriwijaya Indralaya
13. Puskesmas Kertapati
14. Puskesmas Boombaru
15. Puskesmas Gandus
16. Puskesmas 23 Ilir
17. Puskesmas Makrayu
18. Lapas Narkotika Kelas II B Palembang
19. Lapas Perempuan Kelas II A Palembang
20. Lapas Kelas I Palembang
21. Lapas Kelas II A Muara Beliti
22. Puskesmas C. Nawangsasi
23. Puskesmas Cecar
24. Puskesmas Martapura

Sedangkan untuk Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat sebanyak 11 (sebelas) unit, yaitu :

1. Yayasan Ar Rahman
2. Yayasan Mitra Mulia
3. Yayasan Cahaya Putra Selatan

4. Yayasan Griya Anak Sayang
5. Yayasan Bina Sriwijaya Persada Palembang
6. Yayasan Bina Sriwijaya Persada Prabumulih
7. Yayasan Musi Bersinar
8. Yayasan Karunia Insani
9. Yayasan Bersama Kita Bisa
10. Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa Rumah Antara
11. Klinik Yulia Asniati

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/701/2018 tentang Penetapan Institusi Penerima Wajib Lapor dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengampu dan Satelit Program Terapi Rumatan Metadona di Sumatera Selatan terdapat 62 (enam puluh dua) Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL). Di antara 62 (enam puluh dua) IPWL tersebut, yang aktif hanya 8 (delapan) IPWL antara lain:

1. Klinik Pratama BNNP Sumatera Selatan
2. Klinik Pratama Praja Nugraha BNNK Prabumulih
3. Klinik Pratama Abdi Karya BNNK Pagar Alam
4. Klinik Pratama Sebiduk Semare BNNK Lubuk Linggau
5. Klinik Pratama Saling Keruani Sangi Kerawati BNNK Empat Lawang
6. Rumah Sakit Ernaldi Bahar
7. Puskesmas Kertapati
8. Puskesmas Boombaru

Dan berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 43/HUK/2020 tentang Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Sumatera Selatan terdapat 8 (delapan) IWPL yang keseluruhannya IPWL nya aktif. Adapun * (delapan) IPWL tersebut antara lain:

1. IPWL Sriwijaya Indralaya
2. Yayasan Ar Rahman
3. Yayasan Mitra Mulia
4. Yayasan Cahaya Putra Selatan

5. Yayasan Bina Sriwijaya Persada
6. Yayasan Karunia Insani
7. Yayasan Bersama Kita Bisa
8. Yayasan Dharma Wahyu Insani Foundation

Berdasarkan data yang didapat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Selatan, jumlah penghuni lapas dengan narapidana narkoba pengguna di Wilayah Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.0 Data Penghuni Lapas Kasus Penyalahgunaan Narkoba

NO.	NAMA UPT	JUMLAH PENGHUNI	Narapidana Narkoba (Pengguna)
1	2		
1	Lapas Kelas I Palembang	1589	46
2	LPKA Kelas I Palembang	123	0
3	Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang	545	16
4	Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti	702	13
5	Lapas Kelas IIA Lubuk Linggau	1125	207
6	Lapas Kelas IIA Lahat	433	132
7	Lapas Kelas IIA Tanjung Raja	939	37
8	Lapas Kelas IIA Banyuasin	1403	41
9	Lapas Kelas IIB Sekayu	1100	20
10	Lapas Kelas IIB Muara Enim	1151	34
11	Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin	1110	55
12	Lapas Kelas IIB Kayu Agung	1124	48
13	Lapas Kelas IIB Martapura	488	31
14	Lapas Kelas IIB Muaradua	271	30
15	Lapas Kelas IIB Empat Lawang	249	0
16	Lapas Kelas III Surulangun Rawas	285	10
17	Lapas Kelas III Pagar Alam	200	76
18	Rutan Kelas I Palembang	1332	83
19	Rutan Kelas IIB Baturaja	408	205
20	Rutan Kelas IIB Prabumulih	501	11
JUMLAH		15078	1095

Sumber Data : Kemenkumham Wilayah Sumatera Selatan per 1 September 2020

A.4. Data kondisi capaian dan evaluasi kinerja periode sebelumnya

Pada Tahun 2020 BNN Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebanyak 12 (dua belas) sasaran kinerja, dengan indikator kinerja sebanyak 13 (tiga belas) indikator kinerja.Adapun realisasi dari capaian target sasaran kinerja Tahun 2020, sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET
IKK Fungsi Pencegahan				
Meningkatnya penyebarluasan informasi P4GN	Persentase masyarakat yang terpapar informasi P4GN	7 %	17,41%	248,71%
Meningkatnya kebijakan institusi/lembaga yang responsif dalam penanganan permasalahan narkoba	Jumlah institusi/lembaga yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba	21	21	100%
IKK Fungsi Pemberdayaan Masyarakat				
Terselenggaranya pembinaan kawasan atau wilayah rawan narkoba yang berkelanjutan	Jumlah kawasan/wilayah rawan narkoba yang diintervensi Program Pemberdayaan Anti Narkoba	3	3	100%
Terselenggaranya penguatan kapasitas pada institusi dan lingkungan masyarakat dalam upaya penanganan narkoba	Jumlah instansi/lingkungan yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba	62	62	100%
IKK Fungsi Rehabilitasi				
Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah yang memadai	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional	12	17	141,66%
Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi komponen masyarakat yang	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik komponen masyarakat yang operasional	8	11	137,5%

memadai				
Terselenggaranya pelayanan pasca rehabilitasi narkoba yang terintegrasi dan berkesinambungan	Jumlah penyalah guna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika yang menjalani layanan pascarehabilitasi	80	70	87,50%
IKK Fungsi Pemberantasan				
Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan	1	3	300%
Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang diselesaikan (P-21)	15	33	220%
	Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan	-	-	-
Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang diselesaikan (P-21)	2	0	0%
Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100	100	100%
	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non-narkotika	100	100	100%
IKK Fungsi Pendukung				
Terselenggaranya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien	Nilai kinerja anggaran BNN	88	85,67	97,35%

Sumber Data : LKIP BNN Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020

Selama Tahun 2020, Capaian Kinerja BNN Provinsi Sumatera Selatan secara keseluruhan mencapai 133,28%, sedangkan Realisasi Capaian Keuangan mencapai 92,30%.

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1. Potensi

   Berdasarkan analisa kondisi lingkungan strategis terkait berbagai permasalahan narkoba di wilayah provinsi, terdapat sejumlah potensi baik secara internal maupun eksternal organisasi BNN Provinsi Sumatera Selatanyang dapat dikelola dan dioptimalisasi. Berbagai potensi tersebut adalah:

   a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan kepada BNN;
   b. Meningkatnya komitmen politik dan keberpihakan bersama dalam menempatkan dan memperlakukan kejahatan narkoba sebagai isu kejahatan nasional dan internasional;
   c. Adanya perjanjian kerja sama antar Lembaga Instansi Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya serta perusahaan dan Lembaga Masyarakat di wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
   d. Perspektif penanganan masalah dalam kejahatan narkoba semakin mengarah pada upaya integratif dan kolaboratif dan bersifat mainstreaming melalui pelibatan banyak Instansi penegak hukum.
   e. Koordinasi dengan Stakeholder terkait yang dapat memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan P4GN;
   f. Personel BNN Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki keahlian, keterampilan maupun pengalaman dalam melaksanakan tugas P4GN.

2. Permasalahan

   Terdapat sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan prioritas penanganan oleh BNN Provinsi Sumatera Selatan, dimana permasalahan-permasalahan ini dapat menjadi hambatan dalam upaya pencapaian tujuan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan

peredaran gelap narkoba di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. adapun sejumlah permasalahan tersebut adalah:

a. Peraturan Pemerintah Daerah yang belum ada terkait regulasi atau Peraturan Daerah mengenai P4GN;
b. Klien rawat jalan di Klinik Pratama BNNP dan BNNK mayoritas berasal dari limpahan aparat penegak hukum dan cenderung banyak yang Drop Out atau tidak menyelesaikan program;
c. Dalam pelaksanaan program Intervensi Berbasis Masyarakat, minimnya reward yang diberikan kepada masyarakat mempengaruhi motivasi masyarakat dalam memberikan layanan;
d. Sikap dan perilaku masyarakat yang cenderung menutupi adanya penyalahgunaan narkoba yang ada di masyarakat sekitar dan atau keluarganya karena ada perasaan malu dan takut;
e. Minimnya fasilitas rehabilitasi yang dapat memberikan layanan rehabilitasi secara cuma-cuma khususnya bagi masyarakat ekonomi lemah;
f. Luasnya wilayah tidak didukung dengan banyaknya personil sehingga pemetaan dan pengungkapan kasus narkotika belum berjalan dengan optimal;
g. Beberapa wilayah rawan peredaran narkotika, masyarakat menutup diri atas peredaran yang terjadi sehingga penyelidikan harus dilakukan dalam waktu yang lama;
h. Kurangnya Sumber Daya Manusia di BNN Provinsi maupun BNN Kabupaten/Kota;
i. Sarana dan prasarana, seperti kendaraan operasional dan peralatan intelijen untuk mendukung kegiatan penyelidikan Tindak Pidana Narkotika;
j. Belum ada BNNK di 8 (delapan) Kabupaten/Kota yaitu kota Palembang, Kabupaten Pali, Kab OKU, Kab Banyuasin, Kab Muba, Kab Lahat, Kab Oku Selatan, dan Kabupaten Muratara untuk membantu percepatan pelaksanaan P4GN;
k. Kurangnya anggaran di BNNP dan BNNK untuk mendukung anggaran P4GN.

BAB II
KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL

A. TUJUAN ORGANISASI

Tujuan Organisasi BNN sebagaimana disebutkan dalam Renstra BNN 2020-2024 terdiri dari 2 tujuan, yakni:

1. Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Sasaran strategis dari tujuan tersebut adalah meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

   Tujuan dan sasaran strategis tersebut dalam rangka mewujudkan masyarakat yang merasa terlindungi dan terselamatkan dari bahaya ancaman narkoba. Dalam hal ini, upaya penguatan ketahanan masyarakat harus terus ditingkatkan.Selain itu pengintegrasianupaya pencegahan dan pemberantasan sangat penting untuk terus ditingkatkan dalam rangka melemahkan pasar terutama dari sisi supply, melalui tindakan penangkapan dan pemberantasan jaringan pasar narkoba, pengungkapan jaringan dan penyitaan barang bukti beserta aset tersangka peredaran gelap narkoba.
2. Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas. Sasaran strategis dari tujuan tersebut adalah terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, produktif, dan proporosional serta berkinerja tinggi.

   Tujuan dan sasaran strategis ini merepresentasikan fokus kinerja kelembagaan BNN yang berorientasi pada hasil kinerja yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Penguatan kelembagaan yang profesional dan berkinerja tinggi ini akan memberikan wajah transformatif kelembagaan yang berdampak terhadap peningkatan pelayanan publik di lingkungan BNN.

Tujuan dan sasaran strategis tersebut merupakanfokus yang harus dicapai BNN bersama seluruh perangkat organisasinya baik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.Dalam hal ini, BNN Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu unit organisasi BNN berkewajiban mengerahkan seluruh sumber daya dan kekuatannya untuk mencapai target organisasi yang telah ditetapkan.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL

Kebijakan dan strategi operasional BNN Provinsi Sumatera Selatan merupakan rumusan penjabaran dari kebijakan dan strategi BNN. Kebijakan dan Strategi BNN tahun 2020-2024 adalah:

1. Penguatan pengawasan jalur penyelundupan narkoba;
2. Peningkatan kualitas penindakan kejahatan narkoba;
3. Pembangunan ketahanan dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peningkatan kapabilitas rehabilitasi;
5. Penguatan sinergi dan kolaborasi stakeholder.

Kebijakan dan strategi BNN yang bersifat makro tersebut dispesifikasi dan disesuaikan dengan kondisi aktual permasalahan narkoba yang terjadi di wilayah provinsi. Selain itu, dalam rumusan Kebijakan dan strategi BNN Provinsi Sumatera Selatan juga menyelarasakan dengan kebijakan BNN yang berorientasi pada penguatan pelaksanaan P4GN dan peningkatan kapasitas organisasi BNN.

Dalam hal ini, kebijakan dan strategi yang dirumuskan BNN Provinsi Sumatera Selatansifatnya sangat kontekstual dan sesuai dengan kondisi dan karakteristik kewilayahan. Adapun kebijakan dan strategi operasional BNN Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

1. Penguatan regulasi daerah dan pengelolaan sumberdaya pembangunan daerah yang responsif terhadap permasalahan narkoba;
2. Penguatan koordinasi dan kerjasama lintas instansi dalam rangka pengawasan jalur pintu masuk atau perbatasan lintas Kabupaten/Kota dan Provinsi;
3. Peningkatan pertukaran informasi dan data kejahatan narkoba dalam upaya pemetaan dan pengungkapan jaringan sindikat narkoba;
4. Penguatan koordinasi kepastian penegakan hukum narkotika;
5. Peningkatan pembinaan terhadap penggiat P4GN;
6. Penguatan kolaborasi lintas stakeholder dalam penyediaan pelayanan rehabilitasi yang memenuhi standar.

BAB III
RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

A. RENCANA KINERJA

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan menetapkan rencana kinerja sesuai dengan konstruksi struktur kinerja BNN periode 2020-2024.Desain rencana kinerja BNN Provinsi Sumatera Selatan menggunakan pendekatan cascading kinerja sebagai penjabaran dari sejumlah kinerja kegiatan yang dimandatkan ke unit kerja BNN Provinsi.

Terkait penetapan rencana target kinerja BNN Provinsi sudah termasuk rencana target kinerja unit kerja BNN Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi. Dengan demikian, rencana target kinerja yang ditetapkan dalam Rencara Program Kerja Jangka Menengah BNN Provinsi merupakan gambaran dan proyeksi rencana target kinerja pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah provinsi.

Adapun rencana target kinerja BNN Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 disajikan dalam bentuk lampiran matrik rencana kinerja.

B. RENCANA KEBUTUHAN PENDANAAN

Rencana kebutuhan pendanaanseluruh unit kerja BNN di Provinsi Sumatera Selatantahun 2020-2024 sebesar Rp. 131.086.182.000,- (Seratus tiga puluh satu milyar delapan puluh enam juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah), yang tersebar di 9 (Sembilan) unit kerja BNN Kabupaten/Kota. Rencana kebutuhan pendanaan tersebut difokuskanuntuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan BNN baik di bidang pencegahan dan pemberdayaan, pemberantasan dan rehabilitasi.Selain itu, rencana kebutuhan pendanaan juga untuk mendukung operasional rutin perkantoran.

Adapun rencana kebutuhan pendanaan seluruh unit kerja BNN di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020-2024 secara detail disajikan dalam bentuk lampiran matrik rencana kebutuhan pendanaan.

BAB IV
PENUTUP

Dokumen Rencana Program Kerja Jangka Menengah BNN Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 merupakan dokumen penjabaran rencana strategis BNN 2020-2024 yang sekaligus menjadi rujukan bagi seluruh jajaran unit kerja BNN Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Dalam dokumen Rencana Program Kerja Jangka Menengah BNN Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 telah menggambarkan desain rencana program kerja dan struktur kinerja seluruh jajaran BNNdi wilayah Provinsi Sumatera Selatan secara hirarkis sesuai ruang lingkup tugas dan kewenangan.

Lampiran 1
Matrik Rencana Kinerja
Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2020-2024

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	-	3 kab/kota	3 kab/kota	3 kab/kota	3 kab/kota
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	-	9 kab/kota	9 kab/kota	9 kab/kota	9 kab/kota
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi	-	9 kab/kota	9 kab/kota	9 kab/kota	9 kab/kota
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	-	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan
			Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)	-	2.91	2.91	3.00	3.00
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	-	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang
			Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	-	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi	-	2 lembaga	3 lembaga	3 lembaga	3 lembaga
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis	-	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi					
			Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP	-	3.2	3.2	3.2	3.2
7.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika yang berhasil dipetakan*)	-	2 peta jaringan	1 peta jaringan	2 peta jaringan	2 peta jaringan
8.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	-	15 berkas	15 berkas	20 berkas	20 berkas
			Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan*)	-	-	-	-	-
9.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	-	100	100	100	100
			Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	-	100	100	100	100
10.	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21*)	-	1 berkas	1 berkas	1 berkas	1 berkas
11.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNP	-	95	95	95	95
			Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	-	9 kab/kota	9 kab/kota	9 kab/kota	9 kab/kota
12.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP	-	94	94	94	94
			Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	-	9 kab/kota	9 kab/kota	9 kab/kota	9 kab/kota

**) Indikator Kinerja yang dimandatkan pada beberapa BNN Provinsi*

Lampiran 2
Matrik Rencana Kebutuhan Pendanaan
Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2020-2024

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEBUTUHAN PENDANAAN (Dalam Juta Rupiah)				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	-	1,148,877	1,263,765	1,390,141	1,529,155
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	-	548,188	603,007	663,307	729,638
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi	-	2,037,025	2,240,728	2,464,800	2,711,280
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	-	197,000	216,700	238,370	262,207
			Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)					
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	-	310,093	341,102	375,213	417,234
			Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis					
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi	-	1,127,474	1,240,221	1,364,244	1,500,668
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi					
			Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP					

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEBUTUHAN PENDANAAN (Dalam Juta Rupiah)				
				2020	2021	2022	2023	2024
7.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika yang berhasil dipetakan*)	-	200,000	220,000	242,000	266,200
8.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	-	1,012,492	1,113,741	1,225,115	1,347,627
			Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan*)	-	-	-	-	-
9.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	-	236,325	259,958	285,953	314,549
			Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	-				
10.	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21*)	-	210,000	231,000	254,100	279,510
11.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNP	-	10,519,471	11,175,418	12,292,960	13,522,256
			Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target					
12.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP	-	11,058,300	12,164,130	13,380,543	14,718,597
			Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target					

**) Indikator Kinerja yang dimandatkan pada beberapa BNN Provinsi*

Lampiran 3
Matrik Output dan Rencana Komponen/Sub Komponen
Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2020-2024

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	SMP dan SMU Sederajat yang Memperoleh Pengembangan *Soft Skill*	Pengembangan Keterampilan Hidup (softskill) di SMP dan SMU sederajat
				Monitoring dan evaluasi
			Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang Terbentuk	-
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	Rapat Korodinasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba
				Koordinasi dalam Rangka Penguatan Pelaksanaan Advokasi P4GN di BNNK
				Faslitasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba
			Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa	-
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi	Advokasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba	Pembinaan teknis
				Pemetaan kelompok sasaran di Instansi Pemerintah
				Pengembangan Kapasitas dan Pembinaan Masyarakat melalui Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba di Instansi Pemerintah
				Monitoring dan evaluasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba
				Pengembangan Kapasitas dan Pembinaan Masyarakat melalui Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba di Lingkungan Swasta
				Monitoring dan evaluasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba di Lingkungan Swasta

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN
				Pengembangan Kapasitas dan Pembinaan Masyarakat melalui Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba di Lingkungan Masyarakat
				Monitoring dan evaluasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba di Lingkungan Masyarakat
				Monitoring dan evaluasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba di Lingkungan Pendidikan
				Monitoring dan evaluasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba di Lingkungan Pendidikan
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	1. Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari “Bahaya” menjadi “Waspada” 2. Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)	Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika	Pemetaan Potensi Pada Kawasan Rawan Narkoba Pedesaan
				Rapat kerja dalam Rangka Sinergi Program Pemberdayaan Alternatif dengan Stakeholder
				Audiensi dengan Stakeholder dalam rangka Harmonisasi Program Pemberdayaan Alternatif pada Kawasan Rawan Narkoba
				Bimbingan Teknis Lifeskill bagi Masyarakat Kawasan Rawan Narkoba di Wilayah Pedesaan
				Bimbingan Teknis Stakeholder dan Pendamping dalam rencana aksi Pemberdayaan Alternatif pada kawasan rawan narkoba
				Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Alternatif pada Kawasan Rawan Perkotaan
			Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang	-
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	Petugas rehabilitasi berbasis masyarakat yg diberikan pelatihan	Bimbingan Teknis Petugas IBM
				Monitoring Rencana Aksi Petugas IBM
			Agen Pemulihan yang Dilatih Kompetensi Teknis Rehabilitasi	Pelatihan Kompetensi Teknis bagi Agen Pemulihan
				Bimbingan Teknis bagi Agen Pemulihan

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN
	Pemerintah			
		Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	Tenaga rehabilitasi yg diberikan peningkatan kompetensi teknis	Peningkatan kompetensi teknis petugas rehabilitasi
				Verifikasi Tempat Uji Kompetensi (TUK)
				Uji Sertifikasi Konselor Adiksi
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	1. Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi 2. Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP	Lembaga rehabilitasi yang operasional	Rapat Kerja Bidang Rehabilitasi Tingkat Provinsi
				Bimbingan Teknis dan asistensi fasilitas rehabilitasi
				Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi
				Operasional Klinik/Fasilitas Rehabilitasi
				Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan
				Pendampingan Pemulihan
				Layanan SHKPN
				Layanan Pembuatan SHKPN (PNBP)
				Monitoring dan Evaluasi
			Lembaga Rehabilitasi Narkoba yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	-
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang terbentuk	Rapat Koordinasi dan Pemetaan
				Pembentukan Unit IBM
				Operasional Unit IBM
				Supervisi dan Asistensi
				Layanan IBM
			Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional	-
7.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan*)	Laporan Informasi Intelijen Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Pengumpulan Informasi Intelijen
8.	Penyidikan	Jumlah berkas perkara tindak	Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika	Pembinaan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN
	Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21		Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Tindak Pidana Narkotika
				Monitoring dan evaluasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika
		Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya*)	Operasi Pemusnahan Titik Lokasi Lahan Tanaman Narkotika	-
9.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	Layanan pengawasan dan pengelolaan barang bukti narkotika dan non-narkotika	Penerimaan barang bukti
				Pengeluaran barang bukti
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	Layanan pengawasan dan perawatan tahanan tindak pidana narkotika, prekursor narkotika dan TPPU	Pengawasan dan perawatan tahanan tindak pidana narkotika, prekursor narkotika dan prekursor narkotika
				Penyelenggaraan asesmen terpadu bagi penyalahguna narkotika
10.	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21*)	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Kegiatan Penyelidikan dan Pengembangan Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika
				Kegiatan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika
				Kegiatan Pra Tahap II dan Tahap II Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika
				Menghadirkan Saksi Untuk Persidangan dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika
11.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana	1. Nilai Kinerja Anggaran BNNP 2. Jumlah BNNK di wilayah	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja
				Koordinasi Penyusunan RKA
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi
				Koordinasi Penyusunan Laporan

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN/SUB KOMPONEN
	Program dan Anggaran BNN	provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target		
12.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP 2. Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	Layanan Manajemen Keuangan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan
				Monitoring dan Evaluasi
			Layanan Perkantoran	Pembayaran Gaji dan Tunjangan
				Operasional Perkantoran